

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- El Muhtaj, Mahda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hilowitz, Janet. 2004. *Child Labour: A Textbook for University Students*. Jenewa: International Labour Office.
- Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Adittyta Bakti.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, Soejono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

JURNAL

- Rusli, Hardijan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 3, 2006, hlm. 42 - 43.
- Suharyo. 2015. *Pembentukan Peraturan Daerah dan Penerapan Sanksi Pidana serta Problematikanya*, Rechts Vinding Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 433.

KONVENSI INTERNASIONAL

- Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.
- ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* 1973.

Convention on The Rights of The Children 1989.

*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for
Elimination of The Worst Forms of Child Labour 1999*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour*;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

PUBLIKASI INSTANSI

BPS – ILO/IPEC. 2009. *Survey Pekerja Anak Indonesia 2009*.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015, *Laporan Kegiatan Fasilitasi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*.

International Labour Organization. 2013. *Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 20 Tahun*.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2016. *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2016. *Data dan Informasi Pekerja Anak*.

Sekretariat Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 2008, *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.

INTERNET

- Anik. *Indeks Pembangunan Manusia.*
<http://jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/indeks-pembangunan-manusia>. (diakses 20 September 2016, jam 21.05).
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010-2017*, <https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>, diakses 6 Maret 2018 jam 20.00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. *PPA-PKH untuk Indonesia Bebas Pekerja Anak*,
<http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=MjI0&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGEmbGJhY2s9>
(diakses 20 September 2016, jam 21.13).
- International Labour Organization. *About the International Programme on the Elimination of Child Labour*. <http://www.ilo.org/ipecc/programme/lang--en/index.htm> (diakses 9 Januari 2017 jam 21.00).
- International Labour Organization. *Conventions and Recommendations*. <http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm> (diakses 9 Januari 2017, jam 22.05).
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Kemnaker dan ILO Komitmen Wujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*,
<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/kemnaker-dan-ilo-komitmen-wujudkan-indonesia-bebas-pekerja-anak-tahun-2022>, diakses 8 Maret 2018 jam 14.00.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Termasuk Komisi Hukum Nasional, Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural*,
http://setkab.go.id/termasuk-komisi-hukum-nasional-presiden-jokowi-bubarkan-10-lembaga-non-struktural/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp5669b08daeb3e=1a0bd40c9d, diakses 13 Maret 2018 jam 10.00.
- Sucipto, Purnomo. *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan*,
<http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, diakses 8 Maret 2018 jam 22.00.